

Accepted: April 2025	Revised: Mei 2025	Published: Juni 2025
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

IMPLEMENTASI KURIKULUM INKLUSIF UNTUK MENANAMKAN NILAI TOLERANSI DAN ANTI-RADIKALISME DI SEKOLAH DASAR

Khoiruzzaim Kurniawan

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

e-mail: khoiruzzaimkurniawan@gmail.com

Abstract

Radicalism and intolerance in educational settings pose significant challenges to building a harmonious and inclusive society. Primary education plays a strategic role in instilling values of tolerance from an early age to prevent future radicalization. This study aims to analyze the implementation of an inclusive curriculum in fostering values of tolerance and anti-radicalism in elementary schools. Using a qualitative approach and case study method, this research explores learning strategies, the role of teachers, and challenges in implementing an inclusive curriculum. The findings indicate that schools implementing inclusive curricula successfully enhance mutual respect among students, reduce negative stereotypes, and promote harmonious social interactions. Teachers play a central role in shaping an inclusive learning environment through discussion-based methods, case studies, and multicultural education. However, challenges such as limited resources, insufficient teacher training, and resistance from some community members remain major obstacles to the implementation of inclusive curricula. This study recommends strengthening inclusive education policies through more intensive teacher training, providing necessary support facilities, and fostering collaboration among schools, families, and communities to create an inclusive and tolerant learning environment. With a comprehensive approach, an inclusive curriculum can serve as an effective strategy in shaping a younger generation that is more tolerant and free from the influence of radicalism.

Keywords: *Inclusive curriculum, tolerance; anti-radicalism; primary education; social inclusion.*

Abstrak

Radikalisme dan intoleransi di lingkungan pendidikan menjadi tantangan yang signifikan dalam membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif. Pendidikan dasar memegang peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini guna mencegah radikalisme di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kurikulum inklusif dalam menanamkan nilai toleransi dan anti-radikalisme di sekolah dasar. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi strategi pembelajaran, peran guru, serta tantangan dalam penerapan kurikulum inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang

menerapkan kurikulum inklusif berhasil meningkatkan sikap saling menghormati di antara siswa, mengurangi stereotip negatif, serta meningkatkan interaksi sosial yang harmonis. Guru memiliki peran sentral dalam membentuk lingkungan belajar yang inklusif melalui metode pembelajaran berbasis diskusi, studi kasus, serta pendidikan multikultural. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan guru, serta resistensi dari sebagian masyarakat masih menjadi kendala utama dalam implementasi kurikulum inklusif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan pendidikan inklusif melalui pelatihan guru yang lebih intensif, penyediaan fasilitas pendukung, serta kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan toleran. Dengan pendekatan yang komprehensif, kurikulum inklusif dapat menjadi strategi efektif dalam membentuk generasi muda yang lebih toleran dan terbebas dari pengaruh radikalisme.

Kata Kunci: Kurikulum inklusif; toleransi; anti-radikalisme,; pendidikan dasar; inklusi sosial.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam membentuk karakter individu dan masyarakat. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2022) menunjukkan bahwa 85% program pendidikan di Indonesia memiliki komponen yang berfokus pada pengembangan karakter, seperti toleransi dan kerja sama. Selain itu, laporan dari UNICEF (2021) mengungkapkan bahwa pendidikan yang berkualitas dapat mengurangi konflik sosial hingga 40% di wilayah-wilayah dengan keberagaman budaya yang tinggi. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan inklusif. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan anti-radikalisme ke dalam proses pembelajaran. Toleransi, yang didefinisikan sebagai sikap menghargai perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan (Setiadi, 2018), menjadi landasan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, radikalisme, yang dapat diartikan sebagai paham atau ideologi yang mendorong perubahan secara ekstrem dengan cara-cara kekerasan (Milla & Ancok, 2016), mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui implementasi kurikulum inklusif di sekolah dasar sebagai upaya preventif sekaligus solutif.

Kurikulum inklusif, nilai toleransi, dan upaya melawan radikalisme merupakan tiga aspek yang semakin mendapat perhatian dalam konteks pendidikan di Indonesia. Fakta sosial menunjukkan bahwa tantangan-tantangan seperti ketimpangan pendidikan, intoleransi, dan radikalisme menjadi penghalang utama bagi terwujudnya masyarakat yang damai dan berkeadilan. Dalam tulisan ini, akan dibahas secara mendalam tentang konsep kurikulum inklusif, strategi menanamkan nilai toleransi, dan pendekatan anti-radikalisme sebagai kelengkapan latar belakang dalam membangun sistem pendidikan yang lebih humanis.

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), akses pendidikan yang merata masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Wilayah-wilayah terpencil dan marginal seringkali kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar yang memadai (Kemendikbudristek, 2023). Fakta ini memperlihatkan urgensi penerapan kurikulum inklusif yang memastikan semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat menikmati pendidikan yang setara.

Penelitian menunjukkan bahwa kurikulum yang tidak inklusif cenderung memperparah kesenjangan sosial. Misalnya, studi dari Universitas Pendidikan Indonesia mengungkapkan bahwa siswa dengan latar belakang sosial ekonomi rendah sering kali merasa teralienasi dalam sistem pendidikan yang tidak dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan mereka (Sutrisno et al., 2022).

Survei yang dilakukan oleh Setara Institute (2021) menunjukkan peningkatan sikap intoleran di kalangan pelajar. Hal ini diperparah dengan penyebaran narasi-narasi yang mendiskreditkan kelompok tertentu melalui media sosial. Pendidikan yang tidak mengintegrasikan nilai toleransi seringkali gagal membentuk karakter siswa yang inklusif dan menghargai keberagaman. Sekolah sebagai institusi formal memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai toleransi. Namun, dalam praktiknya, banyak sekolah yang belum mengintegrasikan pendekatan lintas budaya dalam kurikulum mereka, sehingga siswa tidak terbiasa berinteraksi dengan perbedaan secara positif (Hasan et al., 2021).

Radikalisme telah menjadi ancaman serius di dunia pendidikan. Laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan bahwa institusi pendidikan menjadi salah satu target utama penyebaran paham radikal, terutama melalui jalur organisasi ekstrakurikuler (BNPT, 2022). Radikalisme tidak hanya merusak tatanan sosial tetapi juga menghambat proses pembelajaran. Siswa yang terpapar ideologi radikal cenderung kehilangan kemampuan berpikir kritis dan menjadi intoleran terhadap perbedaan (Zulkarnain, 2021).

Kurikulum inklusif adalah pendekatan pendidikan yang memastikan semua siswa, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau kondisi fisik, memiliki akses yang setara terhadap pembelajaran (UNESCO, 2021). Prinsip utama kurikulum inklusif meliputi: Aksesibilitas, Menjamin semua siswa dapat mengikuti pembelajaran tanpa hambatan fisik atau non-fisik. Relevansi, Menyesuaikan konten pembelajaran dengan kebutuhan dan konteks siswa. Keberlanjutan, Mengintegrasikan pembelajaran yang mendukung perkembangan jangka panjang.

Kurikulum Merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek merupakan salah satu upaya menuju kurikulum inklusif. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya pelatihan bagi guru dan kurangnya fasilitas pendukung di sekolah-sekolah pedesaan (Rahmawati et al., 2023). Menanamkan nilai toleransi memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk: Integrasi dalam Kurikulum Nilai toleransi harus menjadi bagian integral dari setiap mata pelajaran, seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pembelajaran Lintas Budaya seperti Mengadakan program pertukaran pelajar atau kegiatan lintas budaya untuk memperluas wawasan siswa. Serta Pelatihan Guru, Guru harus diberikan pelatihan khusus tentang cara mengelola kelas yang beragam secara budaya dan agama.

Di beberapa sekolah, program "Hari Keberagaman" telah berhasil meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan (Widodo et al., 2022). Pendidikan kritis yang mengajarkan siswa untuk menganalisis informasi secara mendalam adalah pendekatan efektif dalam melawan radikalisme. Siswa diajarkan untuk mengenali narasi yang mengandung bias dan propaganda, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh ideologi radikal. Pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi pembelajaran berbasis daring yang mengintegrasikan materi anti-radikalisme, dapat menjadi alat yang efektif. Misalnya, platform "Belajar Damai" yang dikembangkan oleh BNPT telah membantu ribuan siswa memahami bahaya radikalisme (BNPT, 2023). Kurikulum inklusif, nilai toleransi, dan anti-radikalisme adalah tiga pilar penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang mendukung harmoni sosial. Fakta sosial menunjukkan bahwa ketiganya masih menghadapi

tantangan serius di Indonesia. Oleh karena itu, upaya integrasi ketiga aspek tersebut dalam kurikulum pendidikan menjadi sangat mendesak. Dengan langkah-langkah strategis seperti pelatihan guru, pembelajaran lintas budaya, dan pemanfaatan teknologi, pendidikan dapat menjadi benteng utama dalam membangun masyarakat yang inklusif, toleran, dan bebas dari radikalisme.

Fenomena meningkatnya intoleransi dan radikalisme di Indonesia telah menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk pemerintah, pendidik, dan masyarakat luas. Data dari Setara Institute (2020) menunjukkan bahwa kasus intoleransi di lingkungan pendidikan terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Laporan tersebut mencatat bahwa pada tahun 2015 terdapat 45 kasus intoleransi di lingkungan pendidikan, yang meningkat menjadi 67 kasus pada tahun 2019. Bentuk intoleransi yang paling dominan adalah diskriminasi berbasis agama, yang mencakup 55% dari total kasus yang dilaporkan. Fakta ini mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih sistematis untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan toleran. Selain itu, penelitian oleh Wahid Foundation (2018) mengungkapkan bahwa sekitar 23,3% pelajar di Indonesia menunjukkan potensi terpapar paham radikal. Fakta ini diperparah oleh temuan bahwa sebagian besar anak usia sekolah dasar berada dalam fase perkembangan kognitif dan afektif yang rentan terhadap pengaruh ideologi tertentu (Piaget, 1964).

Meskipun kurikulum 2013 telah menekankan pentingnya pendidikan karakter (Kemendikbud, 2013), pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi tantangan ini. Studi oleh Nasution (2019) menunjukkan bahwa banyak guru merasa kesulitan menerjemahkan nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran sehari-hari karena kurangnya pelatihan dan pendampingan yang memadai. Selain itu, contoh konkret seperti kasus di salah satu sekolah dasar di Yogyakarta (Wahid Foundation, 2018) mengungkapkan bahwa meskipun materi toleransi telah dimasukkan ke dalam pelajaran, kegiatan pembelajaran masih bersifat monoton dan kurang melibatkan siswa secara aktif. Hal ini menyebabkan nilai-nilai yang diajarkan tidak sepenuhnya terserap oleh siswa. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan lokal untuk mengoptimalkan implementasi kurikulum. Salah satu kelemahannya adalah pendekatan yang masih bersifat umum dan kurang memperhatikan kebutuhan individu siswa, terutama mereka yang berasal dari latar belakang budaya, agama, dan sosial yang beragam (Nasution, 2019). Dalam konteks ini, kurikulum inklusif dapat menjadi alternatif yang relevan karena menekankan pada pengakuan, penghargaan, dan pemberdayaan perbedaan individu dalam proses pembelajaran (Ainscow, Booth, & Dyson, 2006).

Kurikulum inklusif adalah pendekatan pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua peserta didik tanpa memandang perbedaan latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan khusus (UNESCO, 2009). Dalam praktiknya, kurikulum inklusif tidak hanya berfokus pada penyediaan akses pendidikan, tetapi juga pada penciptaan lingkungan belajar yang mendukung partisipasi aktif semua siswa (Tilaar, 2012). Implementasi kurikulum ini melibatkan berbagai aspek, termasuk adaptasi materi pembelajaran, penggunaan metode pengajaran yang bervariasi, serta pelibatan seluruh pihak terkait, seperti guru, orang tua, dan komunitas.

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa penerapan kurikulum inklusif memiliki dampak positif terhadap pembentukan nilai-nilai toleransi dan penguatan sikap anti-radikalisme. Sebagai contoh, penelitian oleh Supriyanto et al. (2020) mencatat bahwa sekolah dasar di Surabaya yang mengadopsi pendekatan inklusif berhasil meningkatkan tingkat toleransi siswa sebesar 30%

dalam kurun waktu dua tahun. Sementara itu, Hidayat dan Kurniawan (2018) melaporkan bahwa sekolah di Semarang yang menerapkan kurikulum berbasis inklusi mengalami penurunan kasus konflik berbasis identitas hingga 40%. Studi internasional seperti yang dilakukan oleh Booth dan Ainscow (2016) juga menegaskan bahwa implementasi kurikulum inklusif dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung keterlibatan aktif siswa, yang pada gilirannya mengurangi prasangka dan meningkatkan kohesi sosial. Studi oleh Supriyanto et al. (2020) menemukan bahwa siswa yang terlibat dalam pembelajaran berbasis inklusi menunjukkan peningkatan sikap empati dan penghargaan terhadap perbedaan. Penelitian lain oleh Hidayat dan Kurniawan (2018) mengungkapkan bahwa sekolah yang menerapkan kurikulum inklusif berhasil menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan bebas dari konflik berbasis identitas.

Di sisi lain, penelitian internasional juga memberikan bukti kuat tentang efektivitas kurikulum inklusif. Sebagai contoh, kajian oleh Slee (2011) menunjukkan bahwa pendekatan inklusif dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi prasangka dan mempromosikan kohesi sosial di masyarakat yang multikultural. Hal ini sejalan dengan hasil studi Booth dan Ainscow (2016) yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif semua siswa dalam proses pembelajaran untuk menciptakan masyarakat yang lebih toleran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai aspek, antara lain secara Teoretis, Penelitian ini akan memperkaya literatur tentang pendidikan inklusif dan peranannya dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan anti-radikalisme. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori pendidikan yang relevan dengan konteks Indonesia. Secara Praktis, Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para pendidik dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum inklusif di sekolah dasar. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Secara Sosial, Dengan menanamkan nilai-nilai toleransi dan anti-radikalisme sejak dini, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya generasi muda yang memiliki pemahaman yang baik tentang keberagaman dan mampu hidup harmonis dalam masyarakat yang plural.

Penelitian tentang implementasi kurikulum inklusif di sekolah dasar telah menjadi salah satu bidang kajian yang penting dalam pendidikan, terutama dalam konteks Indonesia. Kurikulum inklusif dirancang untuk memastikan bahwa seluruh siswa, tanpa memandang latar belakang atau kemampuan, dapat memperoleh pendidikan yang setara. Dalam konteks ini, nilai toleransi dan anti-radikalisme menjadi bagian integral yang perlu ditanamkan melalui pendekatan inklusif. Beberapa penelitian telah mengkaji implementasi kurikulum inklusif di Indonesia. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2020) membahas bagaimana guru di sekolah dasar menghadapi tantangan dalam menerapkan kurikulum inklusif, terutama dalam mendukung siswa berkebutuhan khusus. Penelitian ini menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada kurangnya pelatihan guru dan sumber daya yang terbatas. Selain itu, studi ini menyoroti pentingnya adaptasi metode pembelajaran yang ramah inklusi.

Penelitian serupa oleh Suryani et al. (2019) menyoroti implementasi kurikulum inklusif di sekolah-sekolah negeri di daerah perkotaan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kebijakan inklusi telah diimplementasikan, penerapannya masih bersifat parsial karena kurangnya pemahaman mendalam tentang konsep inklusi di kalangan pendidik. Faktor budaya juga memengaruhi penerimaan terhadap inklusi di sekolah dasar. Dari perspektif internasional, Slee (2011) mengemukakan bahwa kurikulum inklusif harus dirancang untuk mengakomodasi keberagaman

siswa dalam hal kemampuan, budaya, dan nilai-nilai. Slee menekankan pentingnya lingkungan belajar yang mendukung keberagaman sebagai landasan utama kurikulum inklusif.

Studi oleh Rahmatullah (2021) menyoroiti bagaimana nilai toleransi diajarkan di sekolah dasar melalui pendidikan karakter. Penelitian ini menunjukkan bahwa toleransi sering kali diajarkan melalui pendekatan eksplisit, seperti pembelajaran berbasis proyek dan kegiatan ekstrakurikuler. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya terintegrasi dalam kurikulum formal.

Di sisi lain, penelitian oleh Wijaya dan Hermawan (2020) membahas efektivitas pembelajaran kolaboratif dalam menanamkan nilai-nilai toleransi. Penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi antar siswa dari berbagai latar belakang mampu meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan. Penelitian oleh Anwar (2020) mengkaji strategi pendidikan dalam mencegah radikalisme di kalangan siswa sekolah dasar. Anwar menemukan bahwa kurikulum yang berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan, seperti Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah radikalisme. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa guru memerlukan pelatihan khusus untuk menangani isu-isu radikalisme secara sensitif.

Penelitian lain oleh Hoskins dan Kerr (2012) dari Inggris menyoroiti pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam mencegah radikalisme. Penelitian ini menekankan bahwa pengajaran kritis tentang ideologi radikal harus dilakukan dalam kerangka yang aman dan inklusif. Meskipun banyak penelitian telah membahas kurikulum inklusif, terdapat beberapa kesenjangan yang perlu diatasi, yakni Integrasi Nilai Toleransi dan Anti-Radikalisme. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas kurikulum inklusif secara umum tanpa menyoroiti secara mendalam bagaimana nilai toleransi dan anti-radikalisme dapat diintegrasikan secara sistematis. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji bagaimana kedua nilai tersebut dapat menjadi bagian integral dari kurikulum.

Efektivitas Kurikulum Banyak penelitian berfokus pada implementasi kurikulum tanpa mengukur efektivitasnya dalam membentuk karakter siswa. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan evaluasi untuk menilai sejauh mana kurikulum inklusif efektif dalam menanamkan nilai toleransi dan anti-radikalisme. Konteks Lokal Sebagian besar penelitian internasional tidak mempertimbangkan konteks budaya dan sosial di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan perspektif yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan lokal.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang holistik dalam mengkaji implementasi kurikulum inklusif dengan fokus pada nilai toleransi dan anti-radikalisme di sekolah dasar. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pelaksanaan kurikulum, tetapi juga mengukur efektivitasnya, mengidentifikasi kendala, dan menawarkan solusi praktis. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif di Indonesia. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian tentang kurikulum inklusif, toleransi, dan anti-radikalisme masih memiliki beberapa kesenjangan yang dapat diisi melalui penelitian ini. Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis konteks lokal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kurikulum inklusif yang lebih efektif di Indonesia. Penelitian ini juga memperkuat pentingnya integrasi nilai-nilai toleransi dan anti-radikalisme dalam pendidikan dasar sebagai upaya mencegah radikalisme di masa depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam implementasi kurikulum inklusif dalam menanamkan nilai toleransi dan anti-radikalisme di sekolah dasar. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi komprehensif terhadap dinamika sosial, praktik pendidikan, dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kurikulum inklusif. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif memungkinkan pemahaman yang lebih luas tentang fenomena sosial melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Oleh karena itu, metode ini dipandang paling sesuai untuk mengeksplorasi bagaimana sekolah dasar mengintegrasikan nilai toleransi dan anti-radikalisme dalam pembelajaran.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan member checking dengan meminta tanggapan dari subjek penelitian terhadap temuan yang diperoleh untuk memastikan akurasi data. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas kurikulum inklusif dalam membentuk karakter siswa yang toleran dan berwawasan kebangsaan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam mengembangkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan sosial saat ini.

Hasil dan Pembahasan

Landasan teori merupakan elemen penting dalam penelitian untuk mendukung analisis data secara mendalam dan memberikan perspektif terhadap hasil penelitian. Dalam konteks penelitian ini, teori yang relevan meliputi konsep-konsep yang berkaitan dengan kurikulum inklusif, nilai toleransi, dan upaya pencegahan radikalisme di sekolah dasar. Penjelasan teori ini akan diuraikan secara rinci dengan menyoroti dimensi, subdimensi, dan indikator-indikator yang relevan, baik dalam pendekatan kualitatif maupun kuantitatif.

Kurikulum inklusif adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk memastikan semua peserta didik, tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan khusus, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan bermutu. Definisi ini didasarkan pada pandangan UNESCO (2009), yang menyatakan bahwa inklusi adalah proses mendukung keberagaman siswa dengan menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan adaptif. Dimensi Kurikulum Inklusif meliputi : Aksesibilitas Pendidikan, Desain Kurikulum yang Adaptif dan Partisipasi Sosial. Aksesibilitas Pendidikan merupakan Dimensi ini menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap siswa dapat mengakses pembelajaran tanpa hambatan. Penelitian oleh Susanto (2020) menyatakan bahwa aksesibilitas dapat diwujudkan melalui desain ruang belajar yang ramah disabilitas dan metode pengajaran yang fleksibel. Desain Kurikulum yang Adaptif. Menurut Slee (2011), kurikulum inklusif harus dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan individu siswa. Ini mencakup adaptasi materi pelajaran, metode evaluasi, dan penggunaan teknologi bantu. Partisipasi Sosial adalah Dimensi ini mencakup upaya menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi sosial antara siswa dengan latar belakang yang beragam. Penelitian oleh Suryani et al. (2019) menunjukkan bahwa partisipasi sosial dapat diperkuat melalui kegiatan kolaboratif.

Indikator Kurikulum Inklusif meliputi Tersedianya Fasilitas Pendidikan yang Mendukung Inklusi, Pelatihan Guru tentang Pendidikan Inklusif, dan Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat dalam Mendukung Pembelajaran Inklusif Fasilitas pendidikan yang mendukung inklusi mencakup

ruang kelas yang ramah disabilitas, alat bantu belajar yang adaptif, serta infrastruktur yang menunjang mobilitas siswa berkebutuhan khusus. Penelitian oleh Susanto (2020) menunjukkan bahwa fasilitas yang inklusif dapat meningkatkan partisipasi siswa dengan kebutuhan khusus dalam pembelajaran. Sebagai contoh, sekolah yang menyediakan ramp akses bagi siswa pengguna kursi roda dan perangkat pendukung audio bagi siswa dengan gangguan pendengaran menunjukkan peningkatan keterlibatan siswa dalam aktivitas belajar. Guru memegang peranan penting dalam mengimplementasikan kurikulum inklusif. Pelatihan guru tentang pendidikan inklusif bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam menyusun strategi pembelajaran yang adaptif dan memahami kebutuhan individu siswa. Berdasarkan penelitian oleh Wardani (2021), guru yang dilatih secara khusus dalam pendidikan inklusif mampu menciptakan suasana belajar yang lebih inklusif, di mana setiap siswa merasa diterima dan didukung dalam pembelajaran. Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat dalam Mendukung Pembelajaran Inklusif Keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga pada keterlibatan orang tua dan masyarakat. Orang tua dapat berperan sebagai mitra dalam mendukung kebutuhan belajar anak mereka, sedangkan masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang ramah terhadap keberagaman. Penelitian oleh Suryani et al. (2019) menunjukkan bahwa kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat memperkuat keberhasilan kurikulum inklusif dalam membangun nilai toleransi dan menurunkan stigma terhadap siswa berkebutuhan khusus.

Toleransi dalam pendidikan adalah kemampuan untuk menerima dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek budaya, agama, maupun pandangan hidup. Menurut Rahmatullah (2021), nilai toleransi dapat diajarkan melalui pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada keberagaman. Dimensi Toleransi meliputi Penghargaan terhadap Perbedaan. Dimensi ini melibatkan pengembangan sikap menerima perbedaan individu dan kelompok. Penelitian oleh Wijaya dan Hermawan (2020) menemukan bahwa kegiatan diskusi kelompok dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap perbedaan. Disamping itu selain Penghargaan terhadap Perbedaan, adanya Pendidikan Multikultural. Pendidikan ini menekankan pada pentingnya pengenalan budaya yang beragam sebagai bagian dari kurikulum. Menurut Banks (2013), pendidikan multikultural dapat mendorong sikap inklusif dan toleransi.

Indikator toleransi merupakan tolok ukur untuk mengevaluasi sejauh mana siswa dapat mengembangkan sikap toleran dalam konteks pendidikan dasar. Beberapa indikator utama yang relevan meliputi: 1) Peningkatan Pemahaman Siswa tentang Keberagaman. Pemahaman tentang keberagaman mencakup pengenalan terhadap berbagai perbedaan budaya, agama, dan pandangan hidup. Proses ini dapat ditanamkan melalui kegiatan pembelajaran yang berbasis dialog, diskusi kelompok, atau studi kasus. Menurut Wijaya dan Hermawan (2020), pemahaman yang mendalam terhadap keberagaman membantu siswa menghargai perbedaan dan mengurangi potensi konflik. 2) Pengurangan Stereotip dan Prasangka. Stereotip dan prasangka seringkali menjadi penghambat dalam pembentukan sikap toleransi. Indikator ini dapat diukur melalui perubahan sikap siswa terhadap kelompok atau individu yang berbeda dari dirinya. Contohnya adalah peningkatan penerimaan siswa terhadap teman dengan latar belakang budaya atau agama yang berbeda, sebagaimana diuraikan oleh Rahmatullah (2021). 3) Peningkatan Interaksi Positif antar Siswa. Interaksi positif mencerminkan hubungan sosial yang sehat antara siswa, di mana mereka saling mendukung dan bekerja sama tanpa diskriminasi. Penelitian oleh Suryani et al. (2019) menunjukkan bahwa kegiatan kolaboratif dalam pembelajaran dapat memperkuat hubungan antarsiswa dan

menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. 3) Partisipasi Aktif dalam Kegiatan Multikultural. Kegiatan multikultural, seperti perayaan hari budaya atau pengenalan tradisi lokal, berkontribusi pada pembentukan nilai toleransi. Partisipasi siswa dalam kegiatan semacam ini menunjukkan pemahaman mereka terhadap pentingnya keberagaman sebagai kekayaan bersama. Banks (2013) mengemukakan bahwa pendidikan multikultural memiliki peran penting dalam membentuk sikap toleransi. 4) Kemampuan untuk Menyelesaikan Konflik secara Konstruktif. Indikator ini mencakup kemampuan siswa untuk memecahkan masalah atau konflik dengan cara yang damai dan berbasis pada dialog. Pendekatan ini membantu siswa memahami perspektif lain dan mencapai solusi yang saling menguntungkan. Brookfield (2012) menekankan pentingnya berpikir kritis dalam menyelesaikan konflik untuk mendukung nilai toleransi.

Dengan indikator-indikator ini, penelitian dapat mengevaluasi sejauh mana implementasi kurikulum inklusif berkontribusi pada pembentukan karakter siswa yang toleran. Setiap indikator dirancang untuk mengukur hasil pembelajaran baik dari segi kognitif, afektif, maupun perilaku siswa. Peningkatan pemahaman siswa tentang keberagaman. Pengurangan stereotip dan prasangka. Stereotip dan prasangka sering kali muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap perbedaan individu atau kelompok. Dalam konteks pendidikan inklusif, pengurangan stereotip dapat dilakukan melalui pendekatan interaktif seperti diskusi terbimbing dan simulasi situasi nyata. Penelitian oleh Rahmatullah (2021) menunjukkan bahwa aktivitas berbasis kelompok yang melibatkan siswa dengan latar belakang yang berbeda secara signifikan dapat menurunkan prasangka.

Peningkatan interaksi positif antar siswa. Interaksi positif antar siswa adalah landasan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan harmonis. Aktivitas kolaboratif, seperti kerja kelompok dan proyek bersama, dapat mempererat hubungan siswa dan mengembangkan empati mereka terhadap satu sama lain. Suryani et al. (2019) menegaskan bahwa program mentoring antar siswa yang berbeda latar belakang budaya dapat memperkuat solidaritas dan memperkaya pengalaman belajar mereka.

Radikalisme dalam konteks pendidikan didefinisikan sebagai penyebaran ideologi ekstrem yang dapat mengancam harmoni sosial. Menurut Anwar (2020), pendidikan adalah alat utama untuk mencegah radikalisme dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kritis terhadap ideologi ekstrem. Dimensi Anti-Radikalisme meliputi Pendidikan Kewarganegaraan. Dimensi ini menekankan pentingnya pengajaran nilai-nilai kebangsaan, seperti Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, sebagai bagian dari kurikulum. Hoskins dan Kerr (2012) menyoroti bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat membangun kesadaran kritis siswa terhadap ideologi radikal. Selain dimensi Pendidikan Kewarganegaraan ada juga Pengembangan Berpikir Kritis. Menurut Brookfield (2012), keterampilan berpikir kritis memungkinkan siswa untuk menganalisis informasi secara objektif dan menolak ideologi radikal. Indikator Anti-Radikalisme meliputi Peningkatan pemahaman siswa tentang nilai-nilai kebangsaan, Pengembangan kemampuan berpikir kritis dan Penurunan perilaku dan sikap intoleran di kalangan siswa.

Landasan teori yang telah diuraikan memberikan kerangka analitis yang kuat untuk penelitian ini. Dengan memadukan konsep kurikulum inklusif, toleransi, dan anti-radikalisme, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pendidikan dasar di Indonesia. Pendekatan ini juga diharapkan mampu mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada dan menawarkan solusi praktis untuk tantangan pendidikan di masa depan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa implementasi kurikulum inklusif di MI Darussalam Pikatan memberikan dampak positif terhadap penguatan nilai toleransi dan pencegahan radikalisme. Adapun temuan utama penelitian ini meliputi: Integrasi Nilai Toleransi dalam Kurikulum. Sekolah telah mengadaptasi kurikulum dengan memasukkan materi keberagaman dan penghargaan terhadap perbedaan. Guru menggunakan metode pembelajaran berbasis diskusi dan studi kasus untuk menanamkan nilai toleransi. Peran Guru dalam Implementasi Kurikulum Inklusif seperti Guru memainkan peran kunci dalam membimbing siswa memahami pentingnya keberagaman. Ada juga Pelatihan khusus bagi guru terkait pendidikan inklusif masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Tantangan dalam Implementasi Kurikulum Inklusif di MI Darussalam Pikatan adalah Masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman guru terhadap konsep pendidikan inklusif. perlunya penguatan kebijakan pendidikan inklusif melalui pelatihan guru yang lebih intensif, penyediaan fasilitas pendukung, serta kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan toleran. Dengan pendekatan yang komprehensif, kurikulum inklusif dapat menjadi strategi efektif dalam membentuk generasi muda yang lebih toleran dan terbebas dari pengaruh radikalisme. Adanya Keterbatasan sumber daya, seperti bahan ajar dan fasilitas pendukung, menjadi kendala utama. Tidak semua orang tua siswa memahami pentingnya pendidikan inklusif, sehingga masih terdapat resistensi dari beberapa pihak.

Konsep Kurikulum Inklusif

Penelitian ini berangkat dari urgensi untuk merespons tantangan multikulturalisme dan ancaman radikalisme di Indonesia, yang semakin mengemuka dalam dekade terakhir (BNPT, 2021; UNESCO, 2018). Data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan peningkatan paparan ideologi radikal pada kelompok usia muda, termasuk siswa sekolah dasar, melalui media digital dan lingkungan sosial (BNPT, 2022). Sementara itu, kurikulum inklusif—yang sejatinya dirancang untuk mempromosikan kesetaraan dan penghargaan terhadap keragaman—belum secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai anti-radikalisme dalam struktur pembelajarannya (Direktorat PKLK, 2020; Ainscow, 2020). Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini akan mengeksplorasi bagaimana literatur terdahulu membahas potensi kurikulum inklusif sebagai medium transformatif dalam membangun ketahanan ideologi peserta didik. Kurikulum inklusif didefinisikan sebagai sebuah pendekatan pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua peserta didik, tanpa terkecuali, dengan mempertimbangkan keragaman latar belakang, kemampuan, dan identitas budaya (Direktorat PKLK, 2020; Florian & Black-Hawkins, 2011). Dalam perspektif pendidikan inklusif, keragaman bukanlah hambatan, melainkan sumber kekuatan yang dapat memperkaya pengalaman belajar (Slee, 2018; Sunaryo, 2021). Di Indonesia, konsep ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 yang menekankan pendidikan untuk semua (*education for all*).

Namun, implementasi kurikulum inklusif di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Studi yang dilakukan oleh Sunaryo (2021) di 50 sekolah dasar inklusif di Jawa Tengah mengungkapkan bahwa 65% guru mengalami kesulitan dalam mengadaptasi materi pembelajaran untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Sementara itu, penelitian Susanto (2020) di Jakarta menunjukkan bahwa kurikulum inklusif seringkali terbatas pada aspek fisik (misalnya aksesibilitas

bangunan), tanpa menyentuh dimensi psikososial seperti penguatan nilai toleransi. Hal ini mengindikasikan adanya diskoneksi antara teori inklusi dan praktik di lapangan.

Nilai Toleransi dan Anti-Radikalisme dalam Pendidikan Dasar

Toleransi dan anti-radikalisme merupakan dua nilai kunci yang perlu ditanamkan sejak dini, mengingat sekolah dasar adalah fase kritis dalam pembentukan karakter (Lickona, 2012; Zuchdi, 2019). Menurut Zuchdi (2019), pendidikan toleransi tidak sekadar mengajarkan sikap menghargai perbedaan, tetapi juga melibatkan pembiasaan (*habituation*) dan keteladanan (*modelling*) dari guru. Sementara itu, anti-radikalisme dalam konteks pendidikan merujuk pada upaya sistematis untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*), resistensi terhadap narasi kekerasan, serta pemahaman mendalam tentang Pancasila (BNPT, 2021; Nuryatno, 2022). Beberapa studi dalam negeri telah menguji efektivitas model pembelajaran tertentu dalam menanamkan nilai-nilai ini. Misalnya, penelitian Nuryatno (2022) di Yogyakarta membuktikan bahwa pendekatan berbasis cerita (*story-based learning*) dapat meningkatkan empati siswa terhadap kelompok minoritas. Di sisi lain, studi komparatif yang dilakukan oleh Ma'arif (2021) mengingatkan bahwa pendekatan monolitik (seperti indoktrinasi) justru berpotensi kontraproduktif dalam membangun toleransi. Temuan ini selaras dengan kritik Freire (1970) terhadap model pendidikan "*banking*" yang pasif dan tidak partisipatif.

Integrasi Kurikulum Inklusif dan Nilai Anti-Radikalisme

Pertanyaan mendasar yang diajukan dalam tinjauan ini adalah: Bagaimana kurikulum inklusif dapat dirancang untuk secara simultan mempromosikan toleransi dan mencegah radikalisme? Beberapa literatur menawarkan kerangka konseptual yang relevan. Ainscow (2020), misalnya, menekankan pentingnya "inklusi sosial" (*social inclusion*) sebagai bagian dari kurikulum, di mana siswa diajak untuk terlibat dalam proyek kolaboratif lintas kelompok. Pendekatan ini sejalan dengan teori kontak Allport (1954) yang menyatakan bahwa interaksi positif antar kelompok dapat mengurangi prasangka.

Di Indonesia, model integratif mulai dikembangkan, meski masih terbatas. Studi kasus oleh Direktorat PKLK (2020) di Surabaya menunjukkan bahwa pengintegrasian muatan lokal (seperti pembelajaran tentang sejarah multikultural Indonesia) ke dalam kurikulum inklusif mampu mengurangi sikap diskriminatif di kalangan siswa. Namun, penelitian lain oleh Wahyudi (2023) mengkritik kurangnya evaluasi jangka panjang terhadap program semacam ini, terutama dalam kaitannya dengan pencegahan radikalisme.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kurikulum inklusif di sekolah dasar memiliki peran signifikan dalam membentuk karakter siswa yang toleran dan anti-radikalisme. Dengan strategi yang tepat, seperti integrasi nilai-nilai keberagaman dalam mata pelajaran, peningkatan pelatihan bagi guru, serta kolaborasi dengan orang tua, pendidikan inklusif dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis. Namun, diperlukan kebijakan yang lebih kuat serta dukungan infrastruktur agar implementasi kurikulum inklusif dapat berjalan lebih optimal di berbagai konteks pendidikan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ainscow, M. (2020). *Promoting inclusion and equity in education: Lessons from international experiences*. London: Routledge.
- Ainscow, M., Booth, T., & Dyson, A. (2006). *Improving schools, developing inclusion*. London: Routledge.
- Anwar, M. (2020). Strategi pendidikan dalam mencegah radikalisme di kalangan siswa sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(2), 45–62.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2021). *Laporan survei paparan radikalisme di lingkungan pendidikan*. Jakarta: BNPT.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2022). *Laporan tahunan: Radikalisme di kalangan pemuda*. Jakarta: BNPT.
- Banks, J. A. (2013). *Multicultural education: Issues and perspectives* (8th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
- Brookfield, S. D. (2012). *Teaching for critical thinking: Tools and techniques to help students question their assumptions*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Direktorat PKLK. (2020). *Panduan implementasi kurikulum inklusif*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York, NY: Continuum.
- Hidayat, R., & Kurniawan, A. (2018). Dampak kurikulum berbasis inklusi terhadap penguatan sikap toleransi. *Jurnal Studi Pendidikan*, 10(1), 33–50.
- Hoskins, B., & Kerr, D. (2012). Citizenship education for radicalization prevention. *Journal of European Education*, 6(3), 55–71.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). (2013). *Kurikulum 2013: Implementasi dan evaluasi*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). (2023). *Pemerataan pendidikan di Indonesia: Tantangan dan solusi*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Nasution, H. (2019). Kendala implementasi pendidikan karakter di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 7(4), 25–39.
- Nuryatno, M. A. (2022). *Pendidikan anti-radikalisme: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmatullah, I. (2021). Model pembelajaran berbasis keberagaman dalam menanamkan toleransi. *Jurnal Pendidikan Multikultural*, 5(2), 70–85.
- Setara Institute. (2021). *Laporan toleransi di kalangan pelajar Indonesia*. Jakarta: Setara Institute.
- Slee, R. (2011). *The irregular school: Exclusion, schooling and inclusive education*. London: Routledge.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, R., et al. (2020). Peran guru dalam implementasi kurikulum inklusif: Studi kasus di Surabaya. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 15(3), 120–140.

- Suryani, N., Wijaya, H., & Hermawan, D. (2019). Evaluasi penerapan kurikulum inklusif di sekolah negeri. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 9(1), 100–115.
- Sutrisno, A., et al. (2022). Dampak ketimpangan pendidikan terhadap kesenjangan sosial di sekolah dasar. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 8(2), 45–67.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Membedah pendidikan nasional: Kritik, konsep, dan reformasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- UNESCO. (2009). *Policy guidelines on inclusion in education*. Paris: UNESCO.
- Wahid Foundation. (2018). *Potensi paparan radikalisme di kalangan pelajar*. Jakarta: Wahid Foundation.
- Zuchdi, D. (2019). *Pendidikan karakter dalam perspektif teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Copyright © 2025 *Journal Salimiya*: Vol. 6, No.2, Juni 2025, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of Journal Salimiya is the property of Journal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>